

Profil Data Terpilah Berdasarkan Gender Sektor Perikanan di Kabupaten Bengkayang

Bagian 1: Lanskap Demografis dan Sosial-Ekonomi Sektor Perikanan di Bengkayang

Untuk memahami dinamika gender dalam sektor perikanan Kabupaten Bengkayang, penting untuk terlebih dahulu memetakan konteks demografis, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Kabupaten ini, dengan lanskap ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam, menunjukkan karakteristik demografis yang unik yang secara inheren membentuk peran dan partisipasi gender dalam angkatan kerja. Analisis awal ini mengungkap adanya kesenjangan data yang signifikan, yang menjadi hambatan mendasar dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti.

1.1. Tinjauan Umum Kependudukan dan Ekonomi

Kabupaten Bengkayang memiliki luas wilayah 5.396,30 km² dan menempati posisi geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 298.979 jiwa. Struktur ekonomi kabupaten ini sangat didominasi oleh sektor primer. Data dari Survei Potensi Desa (Podes) tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di 118 dari 124 desa/kelurahan bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Subsektor perikanan merupakan komponen vital dalam struktur ini, dengan data tahun 2023 mencatat sebanyak 1.911 orang, atau sekitar 4,74% dari total angkatan kerja sebanyak 40.286 orang, yang terlibat di dalamnya.

Meskipun kaya akan sumber daya alam, tantangan kesejahteraan tetap signifikan. Tingkat kemiskinan di Bengkayang pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,03%. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun yang sama berada di angka 69,53, yang tergolong dalam kategori "sedang".

Salah satu karakteristik demografis yang paling menonjol adalah rasio jenis kelamin. Data tahun 2023 menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 108, yang berarti terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Surplus populasi laki-laki ini bukan sekadar catatan statistik, melainkan sebuah faktor kontekstual yang krusial. Dalam struktur ekonomi yang bergantung pada tenaga kerja fisik seperti pertanian dan perikanan tangkap, ketidakseimbangan demografis semacam ini berpotensi memperkuat pembagian kerja berbasis gender tradisional, di mana laki-laki diasumsikan sebagai aktor utama di ranah publik yang "produktif". Asumsi ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat

meresap ke dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya, yang secara implisit maupun eksplisit lebih mengutamakan laki-laki dan semakin meminggirkan peran ekonomi perempuan.

1.2. Partisipasi Angkatan Kerja Berbasis Gender: Jurang Data

Analisis lebih dalam mengenai partisipasi angkatan kerja mengungkapkan adanya jurang data yang signifikan, terutama terkait peran perempuan. Data di tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 menunjukkan kesenjangan yang lebar dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), di mana TPAK laki-laki mencapai 87,24% sementara TPAK perempuan hanya 63,29%. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi formal secara struktural lebih rendah, atau setidaknya, kurang tercatat secara resmi.

Meskipun data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2023 menyediakan rincian pekerja laki-laki dan perempuan di subsektor seperti Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan di tingkat nasional, data spesifik untuk subsektor Perikanan yang terpilah berdasarkan gender di tingkat Kabupaten Bengkayang tidak tersedia dalam sumber data BPS yang dapat diakses. Ketiadaan data ini merupakan temuan kritis pertama dari laporan ini. Walaupun kita mengetahui bahwa sektor perikanan sangat vital bagi ekonomi lokal, kita tidak memiliki perangkat statistik resmi untuk mengukur secara akurat kontribusi masing-masing laki-laki dan perempuan di dalamnya.

Kesenjangan data ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "invisibilitas institusional". Literatur akademis secara konsisten menunjukkan bahwa kerja informal dan berbasis rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan di sektor pertanian dan perikanan sering kali tidak terhitung dalam statistik resmi. Ketika suatu aktivitas ekonomi tidak diukur, maka aktivitas tersebut tidak akan dihargai dalam proses pembuatan kebijakan. Anggaran tidak dialokasikan untuk mendukungnya, dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas—seperti pengurangan kemiskinan atau peningkatan kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)—tidak dipahami. Jurang data ini adalah akar penyebab dari kesenjangan kebijakan yang akan dianalisis lebih lanjut dalam laporan ini.

Tabel 1.1: Indikator Kunci Demografis dan Ekonomi Kabupaten Bengkayang (sekitar 2023)

Indikator	Data	Sumber
Populasi		
Total Penduduk (Akhir 2024)	298.979 jiwa	
Rasio Jenis Kelamin (2023)	108 (108 Laki-laki per 100 Perempuan)	
Ketenagakerjaan		
TPAK Laki-laki (Provinsi Kalbar, 2020)	87,24%	
TPAK Perempuan (Provinsi Kalbar, 2020)	63,29%	

Tenaga Kerja Sektor Perikanan (2023)	1.911 orang (4,74% dari total angkatan kerja)	
Ekonomi & Kesejahteraan		
Sektor Ekonomi Dominan	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan (di 118 dari 124 desa)	
Tingkat Kemiskinan (2023)	6,03%	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (2023)	69,53 (Sedang)	

Tabel ini menyajikan potret ringkas konteks sosio-ekonomi kabupaten. Dengan menempatkan rasio jenis kelamin dan TPAK yang timpang di samping dominasi sektor primer, tabel ini secara visual menegaskan premis inti laporan ini: adanya populasi dengan ketidakseimbangan gender dalam sebuah ekonomi di mana peran gender sangat krusial namun tidak terdokumentasi dengan baik.

Bagian 2: Pembagian Kerja Berbasis Gender di Sepanjang Rantai Nilai Perikanan

Untuk memahami secara mendalam peran gender di sektor perikanan Bengkayang, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap rantai nilainya, yang mencakup perikanan tangkap, budidaya, serta pengolahan dan pemasaran pasca-panen. Analisis pada setiap tahapan ini menunjukkan adanya segmentasi peran yang sangat jelas berdasarkan gender. Data kinerja dari Dinas Perikanan, ketika dipetakan pada peran-peran ini, mengungkap sebuah pola yang menarik: subsektor yang didominasi oleh laki-laki dan perempuan secara terpisah menunjukkan kinerja yang sangat baik, sementara subsektor yang melibatkan keduanya justru mengalami kesulitan.

2.1. Pra-Panen dan Perikanan Tangkap: Ranah Laki-laki

Subsektor perikanan tangkap secara tradisional dan kultural merupakan ranah yang didominasi oleh laki-laki. Dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan laporan kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan secara konsisten merujuk pada para pelaku di subsektor ini dengan istilah "nelayan", sebuah terminologi yang dalam konteks lokal sangat identik dengan laki-laki.

Secara ekonomi, subsektor ini menunjukkan kinerja yang sangat kuat dan konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi produksi perikanan tangkap mencapai 9.126,13 ton, melampaui target sebesar 8.292 ton, atau dengan kata lain mencapai 110,06% dari target. Keberhasilan ini didukung oleh program-program pemerintah yang terfokus, seperti "Program Pengelolaan Perikanan Tangkap". Program ini menyalurkan dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana (misalnya, kapal dan alat tangkap) serta peningkatan kapasitas yang ditujukan secara spesifik kepada "nelayan kecil". Upaya penguatan kelembagaan juga menunjukkan hasil positif; target pembinaan

kelompok nelayan pada tahun 2023 berhasil dilampaui, dengan 87 kelompok yang dibina dari target 80 kelompok.

2.2. Budidaya Perikanan: Arena Campuran yang Kurang Berkinerja

Berbeda dengan perikanan tangkap, subsektor budidaya melibatkan partisipasi dari laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya diidentifikasi sebagai "pembudidaya ikan" dan diorganisir dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Namun, kinerja subsektor ini sangat kontras dengan perikanan tangkap.

Subsektor budidaya secara signifikan berada di bawah performa. Pada tahun 2023, realisasi produksi hanya mencapai 544,24 ton, sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 4.078 ton. Ini berarti tingkat pencapaiannya hanya 13,35%. Tren kinerja buruk ini konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2021 dan 2022, yang menunjukkan adanya masalah struktural yang persisten. LAKIP Dinas Perikanan sendiri mengatribusikan kegagalan ini pada beberapa faktor, antara lain pemanfaatan lahan yang belum optimal, tingkat produktivitas yang rendah, dan kurangnya pengetahuan teknis di kalangan pembudidaya. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan layanan penyuluhan yang lebih efektif dan model dukungan yang lebih tepat sasaran.

2.3. Pasca-Panen: Pengolahan dan Pemasaran, Ranah Perempuan

Kegiatan pasca-panen, yang mencakup pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, merupakan ranah utama aktivitas ekonomi perempuan dalam rantai nilai ini. Para pelakunya diorganisir dalam Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Temuan ini diperkuat oleh literatur akademis dari Kalimantan Barat yang mengonfirmasi bahwa perempuan mendominasi aktivitas pasca-panen, mulai dari pengolahan (pengeringan, pengasinan, dll.) hingga penjualan di pasar lokal.

Secara kinerja, subsektor yang didominasi perempuan ini, sama seperti subsektor perikanan tangkap yang didominasi laki-laki, secara konsisten melampaui target. Pada tahun 2023, produksi hasil olahan perikanan mencapai 16,40 ton, melebihi target sebesar 14,70 ton, atau mencapai 111,56%. Dukungan pemerintah untuk subsektor ini disalurkan melalui "Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan", yang mencakup kegiatan "pembinaan" dan bantuan sarana prasarana pengolahan.

Analisis terhadap data kinerja ini mengungkap sebuah dikotomi yang jelas. Subsektor yang tersegregasi secara gender—perikanan tangkap yang didominasi laki-laki dan pengolahan yang didominasi perempuan—keduanya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sebaliknya, subsektor budidaya yang melibatkan partisipasi campuran justru mengalami kegagalan. Pola ini menyiratkan bahwa struktur sosial dan pengetahuan tradisional yang ada mungkin sangat efektif dalam subsektor yang tersegregasi. Namun, kinerja buruk di subsektor budidaya bisa jadi merupakan sinyal bahwa model dukungan "satu untuk semua" yang saat ini diterapkan untuk "pembudidaya" gagal menjawab kebutuhan, kendala, atau sistem pengetahuan yang mungkin berbeda antara pembudidaya laki-laki dan perempuan.

Lebih jauh lagi, aktivitas pasca-panen yang dilakukan oleh perempuan berfungsi sebagai penyangga ekonomi dan penambah nilai bagi keseluruhan sektor. Perikanan tangkap pada dasarnya adalah usaha yang tidak menentu, sangat bergantung pada cuaca, musim, dan kondisi stok ikan. Kinerja subsektor pengolahan yang secara konsisten melampaui target menunjukkan adanya sistem yang sangat tangguh dan efisien untuk menyerap produk mentah dari sektor tangkap, mencegah pembusukan, menambah nilai, dan memastikan produk sampai ke pasar. Dengan demikian, tenaga kerja perempuan di tahap pasca-panen bukan sekadar aktivitas sampingan; ia adalah penyangga ekonomi kritis yang menstabilkan seluruh rantai nilai perikanan. Peran ini mengurangi kerugian pasca-panen dan memaksimalkan pengembalian ekonomi dari aktivitas penangkapan yang didominasi laki-laki. Hal ini menempatkan perempuan bukan sebagai pembantu perifer, melainkan sebagai mesin utama penciptaan nilai dan mitigasi risiko dalam ekonomi perikanan Bengkulu.

Tabel 2.1: Kinerja Produksi Perikanan vs. Target Berdasarkan Subsektor (2022-2023)

Subsektor	Tahun	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
Perikanan Tangkap (Dominan Laki-laki)	2022	8.053,00	7.974,36	99,02%
	2023	8.292,00	9.126,13	110,06%
Perikanan Budidaya (Partisipasi Campuran)	2022	3.959,00	647,00	16,34%
	2023	4.078,00	544,24	13,35%
Pengolahan & Pemasaran (Dominan Perempuan)	2022	14,00	-	-
	2023	14,70	16,40	111,56%

Sumber: Diolah dari LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu 2023 dan data lainnya. Data realisasi pengolahan 2022 tidak tersedia dalam dokumen.

Tabel ini secara kuantitatif menyoroti kontras tajam antara kinerja subsektor tangkap dan pengolahan yang berkinerja tinggi dengan subsektor budidaya yang berkinerja sangat rendah. Ketika dibaca bersamaan dengan narasi tentang sifat gender dari masing-masing subsektor, tabel ini menjadi alat yang kuat untuk menunjukkan korelasi antara peran gender dan hasil ekonomi, membuka jalan bagi argumen bahwa kebijakan yang responsif gender adalah sebuah keharusan ekonomi, bukan sekadar isu sosial.

Bagian 3: Kerangka Kebijakan dan Dukungan Institusional untuk Kesetaraan Gender di Sektor Perikanan

Evaluasi kritis terhadap kerangka perencanaan dan akuntabilitas pemerintah—mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan, hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)—mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan dan praktik. Meskipun secara umum terdapat pengakuan terhadap isu gender, pertimbangan ini tidak terintegrasi secara efektif ke dalam perencanaan ekonomi sektor perikanan, menciptakan sebuah "silo kebijakan" yang menghambat pengarusutamaan gender.

3.1. Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD 2021-2026): Strategi Ekonomi yang Buta Gender

RPJMD Kabupaten Bengkayang periode 2021-2026 menjadi dokumen perencanaan tertinggi yang mengarahkan seluruh pembangunan daerah. Misi ke-4 dalam dokumen ini secara eksplisit bertujuan untuk memajukan sektor perikanan, dengan target meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB dari 33,63% pada tahun 2020 menjadi 34,05% pada tahun 2026. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai target ini mencakup "Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan" serta "Peningkatan kesejahteraan... nelayan".

Namun, terdapat sebuah kontradiksi yang mencolok. Meskipun RPJMD memiliki bagian terpisah yang membahas pemberdayaan perempuan dan melacak indikator seperti Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), pertimbangan ini sama sekali tidak terintegrasi ke dalam strategi ekonomi yang diuraikan dalam Misi ke-4. Dokumen tersebut tidak memuat istilah "perempuan", "Poklahsar", atau "gender" di dalam strategi pengembangan sektor perikanan. Ini menciptakan sebuah "silo kebijakan", di mana isu gender diperlakukan sebagai isu sosial yang terpisah dari isu ekonomi. Para perencana ekonomi tidak melihat relevansi gender terhadap target produksi mereka, sementara para perencana sosial mungkin tidak memiliki mandat atau kapasitas teknis untuk mengintervensi kebijakan ekonomi sektoral. Akibatnya, pengarusutamaan gender gagal terwujud.

3.2. Perencanaan Strategis Sektor Perikanan (Renstra Dinas Perikanan 2021-2026): Pengakuan Implisit, Pengabaian Eksplisit

Renstra Dinas Perikanan menerjemahkan tujuan makro RPJMD ke dalam program dan target produksi yang lebih spesifik untuk perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan. Struktur programatik Renstra—dengan adanya program terpisah untuk "Pengelolaan Perikanan Tangkap" yang menargetkan "nelayan" dan "Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan" yang menargetkan "pengolah dan pemasar"—secara implisit mengakui adanya pelaku dan aktivitas yang berbeda di sepanjang rantai nilai.

Meskipun terdapat pengakuan implisit ini, Renstra gagal untuk membuat dimensi gender menjadi eksplisit. Tujuan dan indikatornya tetap bersifat netral gender (misalnya, tonase produksi), sehingga kehilangan kesempatan untuk menetapkan target yang lebih bermakna terkait peningkatan pendapatan perempuan, pertumbuhan usaha yang dipimpin perempuan, atau partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Struktur Renstra ini sebenarnya merupakan sebuah "kerangka laten" untuk penganggaran yang responsif gender. Alokasi anggaran dan kegiatan untuk kelompok yang berbeda (nelayan dan pengolah) sudah ada. Tantangannya bukan menciptakan sistem baru, melainkan mengaktifkan kerangka yang ada dengan menjadikan dimensi gender sebagai variabel eksplisit. Sebagai contoh, alokasi anggaran untuk "Program Pengolahan dan Pemasaran" pada dasarnya sudah merupakan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan menambahkan indikator yang terpilah berdasarkan gender ke dalam struktur yang ada, kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih praktis dan efektif.

3.3. Kinerja dan Akuntabilitas (LAKIP Dinas Perikanan 2023): Mengakui Adanya Kesenjangan

LAKIP tahun 2023 melaporkan pencapaian target produksi yang netral gender sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Namun, yang paling signifikan adalah pengakuan internal dari dinas itu sendiri mengenai kelemahan dalam sistem perencanaannya. Di dalam bagian "Solusi", LAKIP secara eksplisit menyatakan perlunya menyusun data yang lebih baik mengenai "Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Nelayan dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan" untuk memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran.

Ini adalah bukti yang sangat krusial. Proses evaluasi kinerja internal lembaga telah mengidentifikasi bahwa kurangnya data granular yang spesifik per kelompok menjadi penghalang bagi perencanaan yang efektif. Meskipun tidak menggunakan kata "gender", laporan ini menunjuk langsung pada kebutuhan akan data terpilah untuk kelompok-kelompok yang dalam praktiknya sangat tersegmentasi berdasarkan gender. Pengakuan ini memvalidasi argumen utama laporan ini dan membuka pintu bagi rekomendasi untuk perbaikan sistematis.

Bagian 4: Jalur Pemberdayaan dan Pembelajaran Lintas Sektor

Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor perikanan, diperlukan mekanisme dukungan yang lebih terstruktur dan holistik. Saat ini, dukungan untuk Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) masih terbatas. Namun, dengan melihat model pemberdayaan yang telah berhasil di sektor pertanian—seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)—terdapat peluang besar untuk melakukan pembelajaran lintas sektor dan mengadaptasi kerangka kerja yang sudah terbukti efektif.

4.1. Peran Kelompok Perempuan di Sektor Perikanan (Poklahsar): Potensi yang Belum Terealisasi

Poklahsar merupakan wadah kelembagaan utama bagi perempuan yang beraktivitas di sektor pasca-panen perikanan. Pemerintah berinteraksi dengan kelompok-kelompok ini melalui kegiatan "pembinaan" dan penyaluran bantuan sarana prasarana. Namun, LAKIP Dinas Perikanan mencatat bahwa koordinasi dengan kelompok-kelompok ini masih "kurang optimal" dan menyerukan perlunya "Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan".

Hal ini mengindikasikan bahwa model dukungan yang ada saat ini kemungkinan besar bersifat sporadis dan lebih terfokus pada keterampilan teknis atau bantuan peralatan sesaat. Model ini belum mencakup pengembangan usaha secara holistik, yang seharusnya meliputi literasi keuangan, manajemen bisnis, strategi pemasaran, dan akses ke pasar yang

lebih luas. Akibatnya, potensi Poklamsar sebagai motor penggerak ekonomi belum dapat direalisasikan sepenuhnya.

4.2. Pembelajaran dari Sektor Pangan dan Pertanian: Model KWT dan P2L

Di sisi lain, sektor pertanian di Bengkulu dan di tingkat nasional memiliki model pemberdayaan perempuan yang jauh lebih matang dan terstruktur, yaitu melalui KWT dan program P2L.

- **Model Kelompok Wanita Tani (KWT):** KWT adalah model yang sudah mapan untuk memberdayakan perempuan di bidang pertanian. Dukungan yang diberikan bersifat komprehensif, mencakup pelatihan terstruktur dalam keterampilan teknis dan manajerial, pertemuan rutin yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian, serta pengembangan lahan percontohan (demplot). Tujuannya adalah untuk membangun kapasitas, kemandirian, dan kepercayaan diri anggota sehingga mereka mampu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada bantuan eksternal.
- **Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L):** Program P2L menyediakan kerangka kerja yang jelas dan pendanaan yang signifikan bagi kelompok perempuan untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga sekaligus menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh, pada "Tahap Penumbuhan", program ini memberikan bantuan pemerintah sebesar Rp 50 juta hingga Rp 75 juta per kelompok, tergantung pada zonasi wilayah. Dana ini dialokasikan untuk komponen kegiatan yang jelas, seperti pembangunan rumah bibit, pengembangan demplot, kegiatan penanaman anggota, dan penanganan pasca-panen. Program ini memiliki tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang terukur, menjadikannya sebuah intervensi yang terencana dengan baik.

Kontras antara model dukungan untuk KWT/P2L di sektor pertanian dengan "pembinaan" yang tidak terdefinisi untuk Poklamsar di sektor perikanan sangatlah tajam. Terdapat disparitas institusional dalam cara pemerintah daerah mendukung kelompok ekonomi perempuan. Tidak ada alasan logis mengapa perempuan pengolah ikan harus menerima dukungan yang kurang terstruktur dan komprehensif dibandingkan perempuan yang menanam sayuran. Kesenjangan ini menunjukkan adanya inkonsistensi kelembagaan, yang mungkin disebabkan oleh bias historis atau kurangnya pembelajaran kebijakan lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah.

Namun, kesenjangan ini juga menghadirkan peluang. Program P2L dapat menjadi cetak biru langsung untuk merancang sebuah "Program Pemberdayaan Poklamsar". Tujuan P2L—yaitu meningkatkan ketersediaan dan akses pangan serta pendapatan rumah tangga melalui produksi yang berorientasi pasar—sepenuhnya selaras dengan potensi yang dimiliki oleh Poklamsar. Komponen-komponen inti P2L dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam konteks perikanan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1: Analisis Komparatif Model Dukungan Instusional: Adaptasi Kerangka P2L untuk Poklahsar

Komponen	Program P2L (Pertanian)	Adaptasi yang Diusulkan untuk Poklahsar (Perikanan)
Tujuan Program	Meningkatkan ketersediaan pangan dan pendapatan rumah tangga.	Meningkatkan nilai tambah produk, keamanan pangan, dan pendapatan anggota Poklahsar.
Kelompok Sasaran	Kelompok Wanita Tani (KWT).	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar).
Komponen 1: Input/Infrastruktur Awal	Sarana Pembibitan (Rumah Bibit, benih, media tanam).	Sarana Produksi Higienis (Bantuan untuk renovasi tempat pengolahan, penyediaan <i>freezer</i> , alat pengemas vakum, dll. untuk memenuhi standar Sertifikasi Kelayakan Pengolahan/SKP).
Komponen 2: Kegiatan Kelompok	Pengembangan Demplot (Lahan percontohan bersama untuk produksi berorientasi pasar).	Pengembangan Unit Pengolahan Bersama (Pusat pengolahan komunal yang dilengkapi peralatan modern untuk efisiensi dan peningkatan skala produksi).
Komponen 3: Kegiatan Anggota	Pertanaman Anggota (Minimal 75 polibag per anggota untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan surplus dijual).	Peningkatan Kapasitas Usaha Anggota (Dukungan individu untuk diversifikasi produk, pengembangan merek, dan pengemasan yang menarik).
Komponen 4: Dukungan Teknis & Manajerial	Penanganan Pasca Panen dan Pelatihan Teknis oleh Penyuluh.	Pelatihan Keamanan Pangan (Cara Pengolahan Ikan yang Baik/CPiB), Manajemen Keuangan, Pemasaran Digital, dan Akses Pasar.
Mekanisme Pendanaan	Bantuan Pemerintah (Hibah) dengan alokasi dana yang jelas per kelompok (misal: Rp 50-75 juta).	Mengalokasikan dana serupa melalui APBD atau mengadvokasi dana DAK Kelautan dan Perikanan untuk program pemberdayaan Poklahsar yang terstruktur.
Indikator Pemantauan	Jumlah kelompok, pemanfaatan lahan, peningkatan pendapatan rumah tangga.	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan SKP, volume produk yang dipasarkan, peningkatan pendapatan rata-rata anggota, jumlah produk baru yang dikembangkan.

Tabel ini berfungsi sebagai peta jalan yang praktis dan dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan. Ini menunjukkan bahwa untuk memberdayakan perempuan di sektor perikanan, tidak perlu menciptakan program baru dari awal. Sebaliknya, pemerintah dapat

mengadaptasi model P2L yang sudah ada, terbukti berhasil, dan diakui secara nasional, sehingga memberikan jalur yang jelas untuk implementasi dan meningkatkan kemungkinan adopsi rekomendasi ini.

Bagian 5: Sintesis, Wawasan, dan Rekomendasi Strategis

Analisis komprehensif terhadap data demografis, kinerja sektoral, dan kerangka kebijakan di Kabupaten Bengkayang secara konsisten menunjuk pada satu kesimpulan utama: perempuan di sektor perikanan, khususnya dalam kegiatan pasca-panen, adalah "mesin tak terlihat" yang menopang nilai dan ketahanan ekonomi sektor ini. Namun, kontribusi vital mereka sebagian besar tidak diakui dalam data resmi, diabaikan dalam perencanaan ekonomi, dan kurang didukung oleh program pemberdayaan yang memadai. Untuk membuka potensi penuh sektor perikanan dan mencapai pembangunan yang inklusif, diperlukan pergeseran paradigma yang menempatkan kesetaraan gender sebagai inti dari strategi pembangunan ekonomi.

5.1. Sintesis Wawasan Kunci: Mengakui Mesin yang Tak Terlihat

Laporan ini telah menunjukkan bahwa perempuan di sektor pasca-panen perikanan merupakan penopang utama rantai nilai. Kinerja ekonomi mereka sangat vital, secara konsisten melampaui target produksi yang ditetapkan pemerintah dan berfungsi sebagai penyangga yang mengurangi risiko bagi keseluruhan sektor. Namun, kontribusi ini menjadi tidak terlihat karena tiga faktor utama:

1. **Data yang Buta Gender:** Ketiadaan data terpilah gender yang sistematis dari lembaga statistik resmi menyebabkan kontribusi ekonomi perempuan tidak terkuantifikasi dan, akibatnya, tidak dihargai dalam perhitungan ekonomi formal.
2. **Perencanaan Ekonomi yang Netral Gender:** Dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan memperlakukan pembangunan sektor perikanan sebagai isu teknis-produksi semata, gagal mengintegrasikan tujuan pemberdayaan perempuan ke dalam strategi ekonomi mereka.
3. **Dukungan Institusional yang Tidak Memadai:** Terdapat disparitas yang jelas antara dukungan yang terstruktur dan didanai dengan baik untuk kelompok perempuan di sektor pertanian (KWT) dan dukungan yang bersifat ad-hoc dan kurang terdefinisi untuk kelompok perempuan di sektor perikanan (Poklahsar).

Mengatasi ketiga hambatan ini adalah kunci untuk mengakui dan memperkuat peran perempuan sebagai mesin penggerak ekonomi di sektor perikanan Bengkayang.

5.2. Rekomendasi Strategis untuk Dinas Perikanan dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, dirumuskan empat rekomendasi strategis yang saling terkait, dirancang untuk dapat diimplementasikan, terukur, dan berdampak.

Rekomendasi 1: Mengarusutamakan Gender dalam Pengumpulan Data dan Sistem Pemantauan.

Tindakan ini bertujuan untuk membuat kontribusi perempuan terlihat secara kuantitatif, yang merupakan langkah pertama menuju pengakuan dalam kebijakan.

- **Aksi:** Dinas Perikanan, bekerja sama dengan BPS Kabupaten Bengkayang, harus diamanatkan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terpilah berdasarkan gender untuk semua program perikanan.
- **Rincian Implementasi:**
 - **Pengumpulan Data:** Wajib mencatat jumlah anggota laki-laki dan perempuan di semua kelompok yang didukung (KUB, Pokdakan, Poklahsar). Data partisipasi dalam pelatihan dan penyaluran bantuan harus dipilah berdasarkan gender.
 - **Survei Dampak:** Melakukan survei berkala untuk mengukur perubahan pendapatan dan aset yang dikontrol oleh laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga nelayan dan pengolah.
 - **Pelaporan Kinerja:** LAKIP Dinas Perikanan harus menyertakan satu bab atau bagian khusus yang menganalisis kinerja program dari perspektif gender, membandingkan capaian antara laki-laki dan perempuan.

Rekomendasi 2: Mengintegrasikan Perspektif Gender ke dalam Siklus Kebijakan dan Perencanaan.

Tindakan ini bertujuan untuk memecah "silo kebijakan" dan memastikan bahwa tujuan kesetaraan gender menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi.

- **Aksi:** Merevisi siklus perencanaan berikutnya (RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan) untuk memasukkan tujuan, indikator, dan target yang spesifik gender.
- **Rincian Implementasi:**
 - **Revisi RPJMD:** Misi ke-4 RPJMD harus secara eksplisit menyebutkan sasaran "meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi perempuan di sektor pasca-panen perikanan".
 - **Revisi Renstra:** Renstra Dinas Perikanan harus menyertakan indikator kinerja baru untuk program yang mendukung Poklahsar, seperti: "Persentase peningkatan pendapatan usaha pengolahan yang dipimpin perempuan", "Jumlah Poklahsar yang berhasil mendapatkan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)", dan "Jumlah Poklahsar yang difasilitasi untuk mengakses kredit formal (misalnya, KUR)".

Rekomendasi 3: Merancang dan Mendanai "Program Pemberdayaan Poklahsar" (P3) yang Terstruktur.

Tindakan ini bertujuan untuk mengatasi disparitas dukungan institusional dengan menciptakan program unggulan yang holistik bagi perempuan pengolah dan pemasar hasil perikanan.

- **Aksi:** Dinas Perikanan harus secara resmi mengadaptasi kerangka kerja program nasional Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang telah terbukti berhasil untuk menciptakan program pemberdayaan yang didanai dengan baik dan terfokus pada Poklhasar.
- **Rincian Implementasi:**
 - **Desain Program:** Sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.1, program ini harus bergerak melampaui "pembinaan" sederhana dan mencakup komponen hibah untuk peningkatan peralatan pengolahan agar memenuhi standar keamanan pangan, pelatihan intensif dalam manajemen keuangan dan pemasaran digital, serta fasilitasi aktif untuk menghubungkan Poklhasar dengan pasar yang lebih luas (ritel modern, pasar online) dan lembaga keuangan formal.
 - **Alokasi Anggaran:** Mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk Program P3, atau secara proaktif mengadvokasi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan untuk mendukung program ini.

Rekomendasi 4: Membangun Kapasitas Institusional untuk Pengarusutamaan Gender.

Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaksana di lapangan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan yang responsif gender secara efektif.

- **Aksi:** Menyelenggarakan pelatihan wajib bagi seluruh staf di Dinas Perikanan dan para penyuluh perikanan lapangan mengenai analisis gender, serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).
- **Rincian Implementasi:**
 - **Materi Pelatihan:** Pelatihan harus membekali staf dengan keterampilan praktis untuk mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda antara klien laki-laki dan perempuan, cara mengumpulkan data terpilah, dan cara menyesuaikan layanan penyuluhan dan pendampingan untuk memberdayakan perempuan secara efektif.
 - **Tindak Lanjut:** Pelatihan ini harus menjadi prasyarat untuk penyuluh lapangan dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja mereka. Ini akan secara langsung mengatasi masalah koordinasi yang "kurang optimal" yang diidentifikasi dalam LAKIP¹ dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat atas dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat masyarakat.